



# **MODEL DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE (DPSIR) DALAM MENILAI KUALITAS UDARA KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Yunianto Setiawan dan Fahrizal Adnan\***,

Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman  
Jalan Sambaliung No. 9 Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119  
Korespondensi Penulis: [wansety@yahoo.com](mailto:wansety@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

Kabupaten Kutai Barat dengan luas wilayah 20.384,6 km<sup>2</sup> yang pada tahun 2019 berpenduduk 163.142 jiwa, merupakan kabupaten yang kaya sumber alam. Dengan pendekatan *driving force, pressure, state, impact, response* (DPSIR) maka penilaian terkait kualitas udara dapat dilakukan. Pada aspek *driving force* maka aspek ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat) Peningkatan daya saing investasi dalam industri dan infrastruktur. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah alat transportasi, meningkatnya industri dan jasa penghasil polutan udara, dan meningkatnya konsumsi energi rumah tangga. Terlihat pada kualitas udara ambient pada permukiman penduduk udara emisi dari kendaraan bermotor/ sumber bergerak. Pemenuhan baku mutu. Akibat yang dapat terlihat berupa meningkatnya tingkat potensi pencemaran udara dan menurunnya kesehatan masyarakat. Diperlukan respon berupa Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Kegiatan dalam upaya untuk menurunkan beban pencemaran terkait pengendalian pencemaran udara

**Kata Kunci:** *driving force, pressure, state, impact, response*, Kutai Barat, Kualitas Air.

## **1. Pendahuluan**

Kualitas udara, baik emisi maupun ambien merupakan komponen lingkungan yang penting untuk dipantau, mengingat kualitas udara yang buruk akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Perkembangan pembangunan di Kutai Barat cukup pesat dalam 5 (lima) tahun belakangan ini. Selain pembangunan di berbagai sektor, aktivitas perekonomian dan semakin padatnya arus lalu lintas mengakibatkan semakin menurunnya kualitas udara di wilayah Kutai Barat. Pencemaran Udara adalah hadirnya kontaminan di ruang terbuka dengan konsentrasi dan durasi yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan gangguan, merugikan atau berpotensi merugikan kesehatan manusia atau hewan, tumbuhan atau bendabenda lainnya atau dapat mempengaruhi kenyamanan. Udara dikatakan tercemar, bila kualitasnya telah melampaui nilai ambang batas (NAB) menurut baku mutu (kualitas udara emisi maupun ambien) yang telah ditetapkan. Bila kualitas udara menjadi jelek dari semula akibat adanya kegiatan, namun masih dibawah NAB yang telah ditetapkan, maka kualitas udara tersebut belum dapat dikatakan tercemar, namun dapat dikatakan sebagai penurunan kualitas udara.

Dari Isu Lingkungan serta Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR) digunakan dalam rangka mengurai permasalahan lingkungan hidup ke dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Tata Guna Lahan 2. Kualitas Air 3. Kualitas Udara 4. Resiko Bencana 5. Tata Kelola dan 6. Perkotaan. Selanjutnya data dilakukan analisis dan ditindaklanjuti dengan penulisan untuk didapatkan pendekatan *driving force, pressure, state, impact, response* (DPSIR) yang mampu menjelaskan secara tepat dan akurat mengenai situasi terkini dari isu lingkungan yang dibahas, tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan isu tersebut berdampak penting bagi lingkungan dan kehidupan, serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meminimalisasi dampak dari isu lingkungan tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan adalah diskusi secara langsung dengan online dikarenakan dalam kondisi pandemic covid 19, tidak bisa rapat melalui offline serta tidak langsung (tertulis) tentang isu-isu



lingkungan hidup yang akan dijadikan sebagai isu prioritas Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020. Jadi peserta melalui aplikasi zoom meeting dapat langsung mengutarakan isu-isu prioritas yang dianggap penting.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### *Driving Force (Pemicu)*

##### **Aspek Ekonomi**

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Widodo, 2006). Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Menurut Todaro (2000), pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Menurut Todaro (2000) ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu: 1) Makanan/sustenance, artinya segala sesuatunya yang tidak hanya digunakan untuk mengganjal perut, tetapi juga mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik; 2) Jati diri/self-esteem, artinya adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa pantas dan layak untuk melakukan atau mengejar sesuatu, dan lain-lain; dan 3) Kebebasan/freedom, artinya kemampuan untuk berdiri tegak, sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Ranis, Stewart dan Ramirez (2000) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit pembangunan manusia

diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau PDRB setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDRB yang berarti juga penambahan pendapatan daerah (Sukirno, 2008).

PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut (BPS Provinsi Kaltim, 2016).

Dari segi laju pertumbuhan PDRB atau yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, diharapkan menimbulkan perubahan-perubahan yang selalu baik pada penggunaan penuh tenaga kerja (full employment), sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian Kutai Barat yang mencapai 4,98 % pada tahun 2018 berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

#### **Daya Saing Investasi**



Pada umumnya para ekonom sepakat jika tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berjuang pada peningkatan pendapatan masyarakat. Teori juga mengatakan bahwa kenaikan investasi dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi fakta yang terjadi di Kutai Barat menunjukkan bahwa pada saat investasi mengalami pertumbuhan yang tinggi, tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1966 memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas (Booth dan Cawley, 1981).

Investasi yang dimaksud yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti, terutama menambah modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan mencakup realisasi PMA dan PMDN di Kutai Barat.

Pada periode Juli-September tahun 2018, PMDN yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kutai Barat sekitar 9 proyek (aliran Rp 326.488.600.000), sedangkan PMA hanya 10 proyek dengan nilai sekitar USD 16.333.300. Jumlah proyek dan modal capital yang digelontorkan oleh pihak asing maupun dalam negeri telah meningkat dari tahun ke tahun. Capaian tersebut tidak terlepas dari segala stake holders yang telah bekerja keras pada segala bidang, khususnya Pemerintah Daerah Kutai Barat melalui Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), perbankan, serta lainnya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana infrastruktur). Daya saing antara aliran PMA dan PMDN di Kota Kutai Barat belum berdampak nyata, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun, dengan penetapan beberapa project dan kemudahan disegala akses, investor asing, ataupun dalam negeri mampu bekerja sama dalam mengalokasikan dana mereka pada berbagai

sektor, sehingga mampu menyerap tenaga kerja di Kota Kutai Barat.

### **Pressure (Tekanan)**

#### **Transportasi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur jumlah seluruh kendaraan yang ada di Kutai Barat adalah 98.001 unit berdasarkan yang wajib melakukan uji KIR kendaraan. Jumlah tersebut belum termasuk kendaraan bermotor dengan plat nomor daerah lain yang beroperasi di Kutai Barat. Setiap tahun pertambahan jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar pada sektor transportasi didominasi oleh bensin, yang menghasilkan emisi gas karbon atau CO<sub>2</sub>. Kebutuhan akan bahan bakar bensin lebih tinggi dibandingkan kebutuhan bahan bakar solar. Dengan demikian penyediaan bahan bakar jenis bensin yang harus disediakan tentunya lebih banyak. Hal ini akan berkorelasi dengan jumlah pengambilan sumber daya alam fosil yang berpotensi meningkatkan emisi buangan dari hasil pembakaran bahan bakar tersebut ke udara. Peningkatan emisi kendaraan bermotor dapat juga dilihat dari jumlah penjualan kendaraan bermotor dari berbagai merk di Kutai Barat. Namun data penjualan kendaraan bermotor di Kutai Barat tidak tersedia.

#### **Industri dan Jasa**

Penurunan proporsi sektor pertanian dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti nilai tambah, teknologi, pemasaran, maupun produksi. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal: (1) lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan semakin sedikit akibat pembangunan daerah, sehingga aktivitas di sektor pertanian semakin terbatas, (2) penduduk yang bekerja di sektor pertanian semakin kecil dan mereka beralih ke sektor ekonomi lainnya, (3) produktivitas sektor pertanian menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun sehingga produksi di sektor pertanian menjadi semakin berkurang, atau (4) terjadi transformasi ekonomi di Kutai Barat dari sektor pertanian menuju sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana upaya Kutai Barat untuk mengaitkan sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan, sehingga pengembangan sektor industri dan perdagangan merupakan



pengembangan yang berbasis pada sektor pertanian.

Sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor utama menunjukkan kontribusi yang fluktuatif selama 2010-2015. Selama 2010-2012 kontribusi sektor ini bila dilihat menggunakan harga berlaku menunjukkan kenaikan namun pada periode 2012-2015 terjadi penurunan yang cukup drastis dari 64,79% pada tahun 2012 menjadi 48,83% di tahun 2015. Pertambangan batubara, emas, dan perak merupakan jenis pertambangan yang utama. Meski demikian, mengingat pertambangan tersebut tidak dapat diperbarui dan masih tingginya ketergantungan pada sektor tersebut, penting bagi Kutai Barat untuk mengembangkan sektor lain, seperti sektor industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang cenderung konstan selama 2010-2015 yaitu sekitar 4%-5% tiap tahun. Pengembangan subsektor lainnya sangat diperlukan agar ketergantungan terhadap satu subsektor saja dapat dihindari.

Dari sisi pertumbuhan nilai output, sektor tersier selama 2010-2015 menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun yang tertinggi, yaitu 16,48% berdasarkan harga berlaku dan 7,72% atas dasar harga konstan. Sementara itu sektor primer menunjukkan rata-rata pertumbuhan per tahun 2010-2015 yang negatif. Hal ini menunjukkan gejala terjadinya transformasi struktural di Kutai Barat meski belum signifikan karena kecilnya proporsi sektor tersier. Sektor primer meskipun menunjukkan tren yang negatif, bagaimanapun masih menjadi sektor yang dominan terutama sektor pertambangan dan penggalian.

### **Konsumsi Energi Rumah Tangga**

Penggunaan bahan bakar di tingkat rumah tangga juga dapat menghasilkan emisi yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas udara di Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Badan Pengolahan Data Statistik, pada tahun 2018 tidak ada data penggunaan bahan bakar untuk rumah tangga per kecamatan dalam wilayah Kubar.

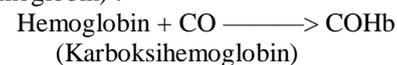
### **State (Kondisi Saat Ini)**

#### **Pemenuhan Baku Mutu**

1. Parameter CO  
Di udara, Karbon Monoksida (CO) terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit, hanya sekitar 0,1 ppm. Di daerah perkotaan dengan

lalu lintas yang padat konsentrasi gas CO berkisar antara 10-15 ppm. Sudah sejak lama diketahui bahwa gas CO dalam jumlah banyak (konsentrasi tinggi) dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan juga dapat menimbulkan kematian.

Karbon monoksida (CO) apabila terhirup ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas CO bersifat racun, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah (hemoglobin) :



Ikatan karbon monoksida dengan darah (karboksihemoglobin) lebih stabil daripada ikatan oksigen dengan darah (oksihemoglobin). Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu.

Dalam keadaan normal konsentrasi CO di dalam darah berkisar antara 0,2% sampai 1,0%, dan rata-rata sekitar 0,5%. Disamping itu kadar CO dalam darah dapat seimbang selama kadar CO di atmosfer tidak meningkat dan kecepatan pernafasan tetap konstan.

Keracunan gas karbon monoksida dapat ditandai dari keadaan ringan, berupa pusing, rasa tidak enak pada mata, sakit kepala, dan mual. Keadaan yang lebih berat dapat berupa detak jantung meningkat, rasa tertekan di dada, kesukaran bernafas, kelemahan otot-otot, gangguan pada sisten kardiovaskuler, serangan jantung sampai pada kematian.

Hasil analisa laboratorium parameter CO Udara emisi Kendaraan Bermotor di 5 (lima) Kecamatan di Kecamatan Muara lawa, Kecamatan Siluq Nguray, Kecamatan Jempang, Kecamatan Bentian besar dan Kecamatan Bongan masih berada di bawah ambang batas baku mutu antara 4,5 % s/d 1,5 % Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisis gas Buang Kendaraan Pada Sumber Bergerak

2. Parameter Hidrocarbon (HC)  
Merupakan golongan senyawa terdapat dialam sebagai minyak bumi, diolah menjadi bahan bakar motor, minyak pelumas dan aspal.



Hidrokarbon walaupun ada berbagai nama untuk polutan ini dari gas sampai senyawa organik yang mudah menguap, semua nama tersebut mengacu pada ribuan polutan terdapat dalam bensin, cairan pencuci kering, zat pelarut untuk industri. Suatu konstituen dari gasoline misalnya dapat menimbulkan leukemia. Jenis lain bereaksi dengan oksida nitrogen dalam cahaya matahari dan menimbulkan asap kabut atau ozon. Masalah yang dihadapi karena adanya polusi hidrokarbon merupakan polutan primer dilepas ke udara secara langsung.

Hasil analisa laboratorium parameter HC udara emisi pada pengujian kendaraan motor pada kendaraan Roda 4 (empat) di Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Bentian, Kecamatan Siluq Nguray dan Kecamatan Jempang menunjukkan kadar HC yang agak tinggi kisaran dari 303 ppm s/d 381 ppm sedangkan untuk ambang batas kendaraan bermotor di atas tahun 2007 pada 200 ppm. Untuk Kecamatan Bongan di bawah baku mutu pada kisaran 110 ppm menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Pada Sumber Bergerak

#### **Impact (Dampak)**

Kemunduran lingkungan yang terjadi di lingkungan perkotaan baik akibat aktivitas manusia maupun yang berasal dari alam akan berdampak kepada sumber daya kehidupan manusia. Semakin tinggi aktivitas manusia dalam mengeksploitasi lingkungan untuk memenuhi kehidupannya, maka semakin tinggi pula tingkat potensi pencemaran lingkungan yang terjadi ditambah lagi dengan tingkat kesadaran penduduk yang kurang peduli akan lingkungan.

#### **Response (Upaya)**

##### **Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)**

Selain pemantauan kualitas udara ambien dengan metode Passive Sampler, Pemerintah Daerah Kutai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk pertama kalinya di tahun 2018 melaksanakan kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP). Pemantauan menggunakan metode otomatis menggunakan alat yang dapat mengukur kualitas udara secara langsung sekaligus menyimpan datanya. Untuk kegiatan EKUP yang dipantau adalah kualitas udara jalan raya (roadside)

pada ruas jalan yang sama dengan kinerja lalu lintas (traffic counting). Monitoring untuk kualitas udara ambien mengacu pada parameter yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu Hydrocarbon (dalam bentuk NMHC atau Non Methane Hydro Carbon), Karbon Monoksida (CO), PM<sub>10</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> dan SO<sub>2</sub>. Disamping itu juga diukur beberapa parameter Meteorologi pada saat dilakukannya pemantauan, yaitu Arah dan Kecepatan Angin, Kelembaban dan Suhu Udara, Intensitas Radiasi Matahari, Posisi Koordinat Pemantauan, dan Curah Hujan.

#### **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan**

Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bertujuan untuk perbaikan kualitas lingkungan, termasuk dalam upaya pengendalian pencemaran udara yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan usaha, baik industri, jasa, pertambangan, maupun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda sendiri.

#### **Kegiatan dalam Upaya Untuk Menurunkan Beban Pencemaran Terkait Pengendalian Pencemaran Udara**

- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, Pembuatan Taman Samarendah, Taman Cerdas, Taman Ekologis Taman Manula
- Pengembangan jalur hijau dan penghijauan pada pedestrian.

#### **4. Kesimpulan**

Pada aspek driving force maka aspek ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat) Peningkatan daya saing investasi dalam industri dan infrastruktur. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah alat transportasi, meningkatnya industri dan jasa penghasil polutan udara, dan meningkatnya konsumsi energi rumah tangga. Terlihat pada kualitas udara ambient pada permukiman penduduk udara emisi dari kendaraan bermotor/ sumber bergerak. Pemenuhan baku mutu. Akibat yang dapat terlihat berupa meningkatnya tingkat potensi pencemaran udara dan menurunnya kesehatan masyarakat. Diperlukan respon berupa Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Kegiatan dalam upaya untuk menurunkan beban pencemaran terkait pengendalian pencemaran udara



## Referensi

- Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Barat. 2019. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Barat 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2017. Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Barat 2017.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2018. Buku Profil Daerah Kabupaten Kutai Barat 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2018. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kutai Barat tahun 2018.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2019. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2016. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2017. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2018. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2019. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat. 2020. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2019.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. 2018. Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Kutai Barat 2018.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat 2019.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat. 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat 2019.
- Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat. 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat 2017.
- Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat. 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat 2018.
- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kutai Barat. 2020. Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Kutai Barat
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031.